

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi suatu wilayah tentu tak luput dari berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahan yang umum dan selalu dibahas di berbagai negara di belahan dunia adalah terkait masalah kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi agenda di seluruh dunia selama beberapa dekade tanpa dapat sepenuhnya di berantas (Greve, 2019). Sebagai contoh, Amerika Serikat yang merupakan negara maju, pada tahun 2021, persentase penduduk miskinnya tembus 12,1%. Sementara itu, meskipun terdapat perbaikan yang signifikan selama lebih dari setengah abad terakhir, permasalahan kemiskinan yang mencolok masih terjadi di banyak negara berkembang (Todaro & Smith, 2022). Penurunan angka kemiskinan telah menjadi fokus utama dalam berbagai upaya pembangunan ekonomi sejak periode tahun 1960-an (Arsyad, 2015). Bahkan saat ini, pemecahan masalah kemiskinan menjadi program pertama dari 17 program Sustainable Development Goals 2030 (SDGs), yang dicanangkan sebagai rencana aksi global para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, bersama dengan United Nation yang diresmikan oleh PBB pada September 2015 silam. Bunyi program pertama dari SDGs tersebut secara lantang menyebutkan *no poverty* yang berarti menekankan upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Sebagai negara agraris, permasalahan kemiskinan yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah di sektor pertanian. Pada tahun 2021, lebih dari 27 juta orang di Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan dan 51,3 persennya merupakan rumah tangga yang berada pada sektor pertanian (BPS, 2021a). Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan.



Gambar 1. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga, 2012-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Peran pertanian dalam perekonomian nasional sangatlah penting dan strategis. Pertanian merupakan sektor yang perlu difokuskan untuk mengurangi masalah kemiskinan karena penduduk miskin paling banyak berada di sektor pertanian (Kharisma, 2020). Selain itu, sektor pertanian menyediakan lapangan kerja untuk sebagian besar populasi di area pedesaan dan menghasilkan pangan untuk populasi tersebut (Rusliyadi *et al.*, 2018). Tercatat pada tahun 2021, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian ternyata menempati urutan teratas dibandingkan 16 sektor lainnya yaitu sebesar 28,3 persen. Oleh karena itu akan tampak logis bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian lebih penting dalam mengurangi kemiskinan daripada pertumbuhan sektor lainnya (Christiaensen & Martin, 2018). Begitu juga yang disampaikan oleh Sheng-gen & Cho (2021), bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara khusus merupakan jalur penting dalam mengurangi kemiskinan.

Secara umum dijelaskan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan kapasitas perekonomian secara keseluruhan dan secara otomatis meningkatkan pendapatan per kapita dan nantinya berujung pada penurunan jumlah penduduk miskin. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida *et al.* (2022) mencatat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Istiqamah *et al.* (2018) dan Pangiuk (2018) yang justru menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Di lain sisi, tingginya pertumbuhan ekonomi tentu tak dapat dirasakan oleh semua pihak jika tidak terciptanya distribusi pendapatan yang merata. Menurut Wahyudi & Asy'ariati (2022), tingkat kemiskinan akan terus meningkat jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Tingkat ketimpangan yang tinggi membatasi efektivitas pertumbuhan dalam mengurangi kemiskinan, sementara meningkatnya ketimpangan akan meningkatkan kemiskinan secara langsung pada tingkat pertumbuhan tertentu (Fosu, 2017). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Saraswati (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan tingkat kemiskinan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiradnyana & Bendesa (2021) dan Oktaviani *et al.* (2022) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Hasil yang diperoleh adalah tingkat ketimpangan distribusi teridentifikasi rendah di wilayah penelitian, artinya distribusi pendapatan cenderung merata namun tingkat kemiskinan di wilayah tersebut tetap tinggi.

Kesejahteraan petani menjadi prioritas utama mengingat dengan semakin sejahteranya petani, maka akan semakin jauh dari lubang kemiskinan. Ukuran kesejahteraan petani dirumuskan dalam suatu indeks yang dinamakan dengan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) dengan indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ). Dengan meningkatnya NTP diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan di sektor pertanian. Hal ini dibuktikan secara empiris dalam penelitian yang dilakukan oleh Yesri & Sugiarti (2021) yang menyimpulkan bahwa peningkatan NTP berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Berbagai kebijakan yang memberikan dampak pada peningkatan kenaikan pendapatan/kesejahteraan rumah tangga pertanian akan bermanfaat dalam mengurangi angka kemiskinan. Upaya peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian salah satunya adalah melalui peningkatan modal. Menurut Simatupang &

Tarigan (2021), ketersediaan layanan kredit dari lembaga keuangan dapat dijadikan sebagai modal bagi rumah tangga pertanian sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga tersebut dan berdampak pada peningkatan pendapatan sektor pertanian secara keseluruhan. Sebelumnya, penelitian Nasiraei *et al.* (2013) membuktikan bahwa kredit keuangan berpengaruh signifikan dengan kemungkinan keluarga pedesaan menjadi sejahtera secara ekonomi. Lebih lanjut, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Rastantra (2022) membuktikan bahwa rumah tangga pertanian yang mendapat akses kredit memiliki kecenderungan untuk tidak menjadi miskin dibandingkan yang tidak mendapat akses kredit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Das (2019) tidak menemukan hubungan antara akses kredit terhadap kemiskinan multidimensi. Pembiayaan kredit dalam pembiayaan kesehatan dan pendidikan anak tidak memberi manfaat langsung. Begitu pula dengan pembiayaan kredit untuk mata pencaharian seperti pertanian, bisnis kecil dan lain sebagainya tidak membawa keuntungan karena kurangnya jejaring pasar.

Permasalahan kemiskinan yang masih terus dibahas diantaranya adalah tentang cara pengukurannya. Selama ini, pengukuran kemiskinan didasarkan pada satu dimensi saja, yaitu pendekatan moneter melalui perhitungan pengeluaran. Para ahli menganggap pengukuran dengan pendekatan moneter ini dinilai hanya mengukur kemiskinan dalam arti sempit sementara kemiskinan itu sendiri bersifat kompleks dan multidimensi. Kritik terhadap metode penghitungan ini terus dilayangkan, salah satunya adalah Amartya Sen yang sejak 1980 dalam berbagai literturnya menegaskan bahwa pendekatan moneter saja tidak cukup dalam menggambarkan keadaan kemiskinan yang sebenarnya. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terukur dari kemampuan daya beli tetapi juga dari akses terhadap pemenuhan kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup setiap individu.

Pentingnya mengukur kemiskinan secara multidimensi juga diungkapkan oleh Elfindri *et al.* (2019). Alasannya adalah dengan mengukur kemiskinan multidimensi maka dapat ditemukan prasarana dasar yang belum terpenuhi sebagai hak dasar manusia. Jika hanya mengukur kemiskinan berdasarkan kebutuhan pokok, maka fungsi dalam penyediaan kebutuhan fisik minimum masyarakat oleh pemerintah belum dapat diketahui. Berbagai studi literatur tentang tentang

kemiskinan multidimensi, tidak hanya terbatas pada diskusi akademis melainkan semakin meluas menjadi perdebatan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Ferreira & Lugo, 2013). Bahkan, di negara seperti Meksiko dan, masing-masing pada tahun 2009 dan 2011, telah menggunakan indeks kemiskinan multidimensi sebagai ukuran kemiskinan resmi kedua negara tersebut (Indriani & Setiyono, 2018).

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan dikarenakan masih minimnya penelitian terkait kemiskinan multidimensi sektor pertanian di Indonesia maka peneliti tertarik untuk melakukan studi terkait pembahasan ini. Penelitian ini nantinya akan bertujuan untuk menganalisis karakteristik determinan kemiskinan multidimensi di sektor pertanian Indonesia, serta menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, nilai tukar petani, dan kepemilikan kredit, terhadap kemiskinan multidimensi sektor pertanian di Indonesia.

% 3 H U X P X V D Q 0 D V D O D K

Berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana kondisi kemiskinan multidimensi rumah tangga sektor pertanian di Indonesia Tahun 2017-2021?
- b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kepemilikan kredit terhadap kemiskinan multidimensi rumah tangga sektor pertanian di Indonesia Tahun 2017-2021?

& 7 X M X D Q S H Q H O L W L D Q

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi kondisi kemiskinan multidimensi rumah tangga sektor pertanian di Indonesia tahun 2017-2021.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kepemilikan kredit terhadap kemiskinan multidimensi rumah tangga sektor pertanian di Indonesia Tahun 2017-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Bagi pemerintah, untuk memberi masukan kepada pembuat kebijakan dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan.
- b. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian mendatang.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Cakupan penelitian ini adalah rumah tangga sektor pertanian di seluruh Indonesia. Rumah tangga sektor pertanian adalah rumah tangga yang terdiri dari kepala rumah tangga atau terdapat salah satu anggota rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Penelitian menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017-2021 periode bulan Maret.

#### **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, terdiri dari sub bab konsep dan teori penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pikir.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, terdiri dari sub bab data dan sumber data, analisis dan interpretasi data, model penelitian, dan definisi operasional variabel.

**BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**, terdiri dari sub bab analisis deskriptif, analisis inferensia, dan rekomendasi kebijakan

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat sub bab kesimpulan dan saran penelitian.